

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA (SIMAS) DALAM PEMUTAKHIRAN DATA KEPEGAWAIAN (Studi Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang)

Ana Dwi Putri Aprilia¹, Slamet Muchsin², Taufiq Rahman Ilyas³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia*

Email: apriliana13@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Efektivitas penggunaan SIMAS dalam pemutakhiran data kepegawaian di BKPSDM Kota Malang, (2) Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pada pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian melalui SIMAS. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran lengkap terkait penelitian yang terjadi di lapangan, kemudian diuraikan secara deskriptif bagaimana SIMAS digunakan dalam pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian di BKPSDM Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, efektivitas penggunaan SIMAS dalam pemutakhiran data kepegawaian di BKPSDM Kota Malang dalam proses pencapaian tujuan, serta integrasi telah berjalan dengan baik, yang dibuktikan dengan tercapainya tujuan program serta sosialisasi yang dilaksanakan dalam mewujudkan integrasi. Namun dalam proses adaptasi dinilai kurang efektif dikarenakan pemahaman pegawai yang berbeda dalam penggunaan SIMAS akibat beragamnya pengguna yaitu pengguna personal, pengguna admin OPD, dan pengguna admin yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang berbeda-beda. Kedua, faktor pendukungnya yaitu diterbitkannya peraturan Walikota Malang terkait SIMAS, adanya dukungan teknis serta tim pengembang khusus yang dibentuk untuk mengelola SIMAS di BKPSDM Kota Malang, sedangkan faktor penghambat yang menjadi kendala diantaranya: proses pemutakhiran data belum sepenuhnya dilakukan secara digital, kurang meratanya pemahaman pegawai dalam penggunaan SIMAS, serta kurangnya kesadaran pegawai dalam melakukan pemutakhiran data pribadinya.

Kata Kunci: Efektivitas, Pelayanan Publik, Sistem Informasi Manajemen

Pendahuluan

Teknologi informasi yang semakin berkembang, tentunya mempengaruhi aktivitas kehidupan manusia dalam berbagai sektor, salah satunya adalah sektor pemerintah. Pemanfaatan teknologi pada sektor publik dilaksanakan melalui reformasi birokrasi sektor publik dengan cara menerapkan salah satu kebijakan pemerintah yaitu *e-government*. Penggabungan antara sistem teknologi informasi dengan sektor pemerintahan yang menciptakan sebuah inovasi baru untuk mendukung pelayanan publik yang meningkatkan keterbukaan dalam mengakses informasi (Wirawan, 2020: 2). *E-government* adalah penggunaan teknologi informasi untuk mendorong demokrasi yang berorientasi pada efektivitas, efisiensi, transparansi, dan fleksibilitas untuk meningkatkan kepuasan dalam pelaksanaan pelayanan publik (Arifah, 2020). Pada kategori *Government to Employees (G2E)*, penerapan *e-government* diwujudkan untuk meningkatkan efisiensi manajemen organisasi pemerintah, meningkatkan koordinasi komunikasi antar

pegawai sampai pada manajemen sumberdaya manusia dengan cara pengembangan sistem informasi kepegawaian yang digunakan sebagai pelayanan kepegawaian di Indonesia.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, adanya sistem informasi dalam organisasi menciptakan penerapan organisasi melalui suatu sistem yang terintegrasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Sistem informasi manajemen dalam organisasi sektor publik mulai diterapkan melalui sistem informasi kepegawaian sebagai upaya pelayanan publik kepada pegawai. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai undang-undang yang sah terkait adanya sistem informasi ASN., Adapun dalam sistem informasi ASN berisi seluruh informasi dan data pegawai ASN termasuk daftar riwayat hidup, daftar pendidikan, daftar riwayat kepangkatan dan jabatan, dan data lainnya mulai dari pegawai tersebut diangkat hingga akhir masa jabatannya.

Pengembangan sistem informasi kepegawaian salah satunya dapat dilihat di BKPSDM Kota Malang melalui website Sistem

Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut SIMAS. Melalui website tersebut kegiatan pemutakhiran data untuk mendukung administrasi kepegawaian dilakukan dengan menggunakan sistem merit yang terintegrasi. Pembentukan Sistem Informasi Manajemen ASN di Kota Malang dilatarbelakangi oleh Peraturan Walikota Malang Nomor 113 Tahun 2019 tentang SIMAS Pemerintah Kota Malang.

Adanya sistem informasi manajemen ASN, dapat menyediakan data kepegawaian yang dapat dipertanggungjawabkan karena memberikan informasi kepegawaian yang akurat/benar dan mutakhir. Namun informasi kepegawaian yang disajikan bersifat dinamis, oleh karena itu diperlukan pemutakhiran data untuk mengoreksi dan menyesuaikan data baik data yang lampau maupun data terkini dengan keadaan kepegawaian yang sebenarnya sehingga dapat diperoleh informasi serta penyajian data yang akurat. Proses pemutakhiran data dapat dilaksanakan secara mandiri melalui *user personal* dengan cara mengisi dan melengkapi data yang ada pada SIMAS dengan data yang benar, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan yang dapat diakses melalui laman sistem informasi manajemen ASN Kota Malang. Data tersebut kemudian diverifikasi oleh fasilitator pada masing-masing perangkat daerah untuk menghasilkan data yang valid sehingga dapat dilaporkan kepada administrator terkait penyediaan informasi kepegawaian yang akurat.

Namun dalam penerapan SIMAS di BKPSDM Kota Malang masih terdapat beberapa kendala dalam mewujudkan kebijakan *E-Government*. *Pertama*, terdapat penumpukan arsip data kepegawaian yang ada di Kantor BKPSDM Kota Malang. Dengan menggunakan sistem informasi, harusnya dapat mengurangi penggunaan kertas untuk mencetak dokumen yang diperlukan sehingga dapat menerapkan konsep *paperless*. Namun temuan yang didapatkan di BKPSDM Kota Malang justru sebaliknya.

Kedua, dalam proses pemutakhiran data pegawai untuk mewujudkan informasi kepegawaian yang akurat dan mutakhir terdapat beberapa kendala seperti masih banyaknya pegawai yang belum melakukan pemutakhiran data pribadi. Hal tersebut menyebabkan tingkat kevalidan data yang ada di Sistem Informasi Manajemen ASN (SIMAS) belum maksimal. Pegawai yang belum beradaptasi dengan teknologi juga menyebabkan penghambat dalam pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian. (SAKIP BKPSDM, 2023)

Ketiga, belum terintegrasinya *database* antara BKPSDM Provinsi Jawa Timur dan database kepegawaian pemerintah kabupaten/kota dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sehingga proses pemutakhiran data harus dilakukan secara berkala. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul “Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi dan Manajemen ASN (SIMAS) Dalam Pemutakhiran Data Kepegawaian (Studi Kasus Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang)”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen ASN (SIMAS) dalam pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian di BKPSDM Kota Malang?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat penggunaan Sistem Informasi Manajemen ASN (SIMAS) dalam pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian di BKPSDM Kota Malang?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis efektivitas penggunaan SIMAS dalam penyediaan informasi kepegawaian yang akurat dan mutakhir di BKPSDM Kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat penggunaan SIMAS dalam pemutakhiran data kepegawaian di BKPSDM Kota Malang.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini, khususnya tentang bagaimana proses serta pelaksanaan pemutakhiran data pegawai melalui SIMAS. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Malang, terutama BKPSDM Kota Malang, dan pemerintah kota lainnya dalam menerapkan pelayanan kepegawaian sesuai dengan tujuan dan prosedur.

Tinjauan Pustaka **Efektivitas**

Efektivitas dapat didefinisikan sebagai upaya organisasi dalam mencapai keberhasilan atas tujuan yang diharapkan, atau pencapaian tujuan dengan tepat dari berbagai alternatif atau metode, dan penentuan pilihan dari berbagai pilihan lainnya. Konsep ini juga sangat penting dalam konteks pelayanan publik (Cahyono et al., 2023).

Menurut Ravianto (2014:11), efektivitas didefinisikan sebagai kualitas pekerjaan yang dilakukan dan seberapa baik individu menghasilkan keluaran yang memenuhi harapan. Artinya, suatu

pekerjaan dianggap efektif jika dapat diselesaikan dengan tepat waktu, biaya, dan kualitas.

Indikator Efektivitas

Peneliti menggunakan indikator pengukuran berdasarkan teori Duncan (Nani, F. et al., 2021: 105) untuk mengukur efektivitas organisasi atau organisasi. Adapun indikator-indikator dalam penentuan efektivitas adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan merupakan sebuah proses atau upaya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pencapaian suatu tujuan terdiri dari beberapa elemen, antara lain tujuan, waktu, dan sasaran tertentu.
2. Integrasi merupakan ukuran tingkat kemampuan suatu organisasi untuk menilai sejauhmana organisasi tersebut dalam berinteraksi, membangun konsensus, dan berkomunikasi dengan berbagai organisasi lainnya.
3. Adaptasi adalah kemampuan suatu organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungannya, diukur dari pertumbuhan kapabilitas dan infrastruktur.

Sistem Informasi Manajemen

SIMAS merupakan sebuah pengembangan dari SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian), mencakup kumpulan subsistem informasi yang komprehensif dan terintegrasi secara harmonis. Tujuan utamanya adalah mengubah data menjadi informasi berharga melalui beragam metodologi, sehingga meningkatkan produktivitas. SIMAS beroperasi selaras dengan gaya dan watak individu manajer, mengikuti standar kualitas yang telah ditetapkan (Wiyono, 2021: 20). Sistem mutakhir ini meliputi perangkat keras, perangkat lunak, *database*, sistem jaringan komputer (*netware*), dan sumber daya manusia (*brainware*).

Pemutakhiran Data

Pemutakhiran data adalah proses yang penting dalam pengelolaan informasi di berbagai bidang, termasuk pada sektor pemerintahan. Pelaksanaan pemutakhiran data melibatkan pengeditan, pembaruan, atau perbaikan informasi yang ada dalam suatu sistem atau database. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang disimpan adalah akurat, relevan, dan up-to-date. Pemutakhiran data membantu memastikan keandalan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan, analisis, pelaporan, dan keperluan operasional lainnya.

Pemutakhiran data ASN merujuk pada proses pembaruan informasi terkait dengan pegawai negeri atau ASN yang merupakan singkatan dari Aparatur Sipil Negara yang digunakan untuk menyebut pegawai yang bekerja di instansi pemerintah di Indonesia. Untuk

mendukung implementasi Satu Data ASN, ASN akan melakukan pemutakhiran data mandiri ASN sesuai prinsip Satu Data Indonesia. Pemutakhiran data merupakan proses pembaruan dan pemajuaan data yang dilaksanakan secara mandiri dan berguna untuk menghasilkan data yang terbaru, akurat, dan berkualitas.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan akurat tentang peristiwa yang terjadi di lokasi. Selain itu, permasalahan yang diteliti bersifat kompleks dan terus berubah. Untuk mendeskripsikan efektivitas penggunaan website Sistem Informasi Manajemen ASN (SIMAS) dalam pemutakhiran data pegawai di BKPSDM Kota Malang, kami menggunakan pendekatan yang lebih natural yaitu wawancara langsung dengan narasumber.

Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini difokuskan di BKPSDM Kota Malang dengan fokus sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian melalui SIMAS di BKPSDM Kota Malang yang diukur menggunakan indikator efektivitas menurut Duncan dalam (Nani, F. et al., 2021) yaitu:
 - a. Pencapaian Tujuan
 - b. Integrasi
 - c. Adaptasi
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian melalui SIMAS di BKPSDM Kota Malang.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kota Malang yang terletak di Jalan Tugu No.1, Kidul Dalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer. Untuk memperoleh data-data primer yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan wawancara dan observasi langsung terhadap berbagai pegawai BKPSDM Kota Malang, antara lain Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Data dan Informasi, petugas arsip, dan operator SIMAS sebagai sumber data yang berharga dalam menyediakan data yang diperlukan.
2. Data Sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal kepegawaian, peraturan

perundang-undangan pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan dokumen dari BKPSDM Kota Malang. Secara khusus, arsip pegawai dan manajemen Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (SIMAS) diakses untuk tujuan tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi (pengamatan). Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian dalam mendukung administrasi kepegawaian melalui SIMAS untuk menemukan fakta penunjang penelitian.
2. Wawancara. Dalam penelitian ini, jenis wawancara terstruktur digunakan dengan membuat instrumen penelitian terlebih dahulu, yaitu pedoman wawancara, yang mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang penggunaan SIMAS untuk memperbaiki data karyawan di BKPSDM Kota Malang, serta wawancara tidak terstruktur yang mencakup pertanyaan bebas di luar pedoman wawancara.
3. Dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah literatur yang berkaitan dengan penggunaan website Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Nasional (SIMAS) dan data yang diambil berupa foto dan rekaman wawancara.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah selesai dalam periode waktu tertentu, menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2019: 321) teknik analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data. Peneliti menyederhanakan data yang telah diperoleh dari BKPSDM Kota Malang dengan melakukan reduksi data, fokus pada informasi yang selaras dengan argumen penelitian.
2. Penyajian Data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data melibatkan penyampaian informasi melalui berbagai cara seperti teks deskriptif, diagram, diagram alur, dan representasi visual hubungan antar kategori.
3. Penarikan Kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini diperoleh dengan melakukan verifikasi data untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai hasil penelitian tentang efektivitas penggunaan SIMAS dalam pemutakhiran informasi sumber daya manusia di BKPSDM Kota Malang.

Keabsahan Data

Dalam metode kualitatif, uji keterpercayaan, keteralihan, keterandalan, dan konfirmabilitas

merupakan bagian dari pemeriksaan keabsahan data (Sugiyono, 2019: 364). Uji keabsahan data penelitian ini adalah:

1. Uji Kredibilitas. Untuk menjamin kredibilitas penelitian, berbagai cara dilakukan, seperti memperluas observasi, menjaga kesinambungan penelitian, melakukan triangulasi data, berdiskusi dengan rekan sejawat, dan melakukan analisis kasus negatif. Selain itu, keterpercayaan dan keandalan data penelitian kualitatif diuji melalui pengawasan dan pemeriksaan menyeluruh.
2. Uji Kepastian (*Confirmability*). Penelitian kualitatif bersifat subjektif, oleh karena itu perlu dilakukan uji kepastian untuk menjadikannya lebih objektif. Uji kepastian dapat dilakukan bersama-sama dan harus disetujui oleh banyak orang yang menyatakan bahwa penelitian tersebut objektif.

Pembahasan

1. Efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen ASN (SIMAS) dalam pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian di BKPSDM Kota Malang.

Untuk mengetahui atau mengukur efektivitas penggunaan SIMAS dalam pemutakhiran data kepegawaian di BKPSDM Kota Malang, peneliti membahas menggunakan teori efektivitas (Duncan dalam Steers, 1985) yang mengacu pada beberapa indikator diantaranya yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Berikut adalah hasil penelitian yang dianalisis berdasarkan hasil wawancara di lapangan dengan indikator efektivitas:

a. Pencapaian Tujuan

Duncan dalam Steers (1985) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas terdapat beberapa hal yang penting untuk diingat diantaranya yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Ini mencakup jumlah waktu yang diperlukan, tujuan, dan dasar hukum untuk pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKPSDM Kota Malang memenuhi kriteria pencapaian tujuan, yang terdiri dari:

1) Tujuan program

Tujuan dari penggunaan sistem informasi manajemen ASN (SIMAS) adalah untuk menciptakan proses pemutakhiran data dengan cepat sehingga dapat menghasilkan data yang terbaru dan mempercepat dalam pelayanan kepegawaian. Hasil penelitian dari tujuan adanya SIMAS di BKPSDM Kota Malang juga dapat meningkatkan penataan dan pola karir pegawai menggunakan merit

sistem, validitas data kepegawaian, serta penerapan e government dalam bidang kepegawaian.

- 2) Target atau sasaran
Sasaran yang dipilih lebih tepatnya adalah seluruh pegawai atau ASN yang ada pada lingkup Pemerintah Kota Malang yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu pengguna personal, pengguna OPD, dan pengguna admin. Target atau sasaran dalam pelaksanaan pemutakhiran data di BKPSDM Kota Malang dinilai tepat sasaran, hal tersebut dibuktikan dengan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh BKPSDM terkait pemutakhiran data. Target tersebut berhasil dicapai dalam satu periode pelaksanaan rencana kinerja.
- 3) Kurun waktu
Berdasarkan teori yang telah dikemukakan dan diamati dari temuan penelitian, mekanisme pemutakhiran data mendukung indikator pencapaian tujuan dan dapat dikatakan efektif yang dibuktikan dengan berjalannya proses pemutakhiran data sesuai dengan mekanisme pemutakhiran data yang ditetapkan di BKPSDM Kota Malang.

b. Integrasi

Integrasi mengukur kapasitas suatu organisasi untuk berkomunikasi, bersosialisasi, dan mengembangkan sistem. Sosialisasi dan pengembangan adalah contoh proses integrasi. Berdasarkan teori ini, kriteria integrasi mencakup beberapa indikator berikut:

- 1) Sosialisasi
Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat sosialisasi yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kota Malang terkait penggunaan SIMAS. Namun pelaksanaan sosialisasi hanya dilaksanakan apabila terdapat perubahan dalam sistem tersebut. Selama SIMAS berjalan telah dilaksanakan proses sosialisasi sebanyak tiga kali pada tahun 2019, 2020, dan 2022.
- 2) Pengembangan sistem
Penggunaan SIMAS tidak hanya untuk pemutakhiran data saja tetapi juga dapat digunakan sebagai pelayanan kepegawaian. Sedangkan untuk pengembangan sistem yang akan dikembangkan adalah terkait rekam jejak ASN salah satunya

adalah pelaksanaan ujian dinas secara online. Namun untuk saat ini, masih dilaksanakan kajian dalam proses pengembangan fitur pada sistem tersebut. Sedangkan untuk pengembangannya mengandalkan pihak ketiga yang bertugas sebagai pengembang sistem informasi manajemen ASN atau SIMAS.

- 3) Komunikasi antar organisasi
Komunikasi yang dilakukan oleh BKPSDM dengan organisasi lain adalah melalui proses sosialisasi dan bimbingan teknis. Selain itu, komunikasi juga dilaksanakan melalui media online seperti whatsapp. Hal tersebut tentu dapat mendukung proses komunikasi antar organisasi dengan BKPSDM selaku pelaksana utama dalam penggunaan SIMAS.

c. Adaptasi

Menurut Duncan (1985), adaptasi dengan perubahan tidak akan berhasil jika pengembangan kemampuan saja yang ditingkatkan tidak disertai dengan adaptasi sarana dan prasarana yang menunjang. Sebaliknya, jika hanya satu aspek dari sarana dan prasarana yang terpenuhi, pengembangan kemampuan pegawai tidak akan terpenuhi. Untuk menentukan seberapa efektif penggunaan Sistem Informasi Manajemen ASN (SIMAS) di BKPSDM Kota Malang, ada beberapa indikator yang dapat digunakan berdasarkan teori adaptasi yang dikemukakan oleh Duncan (Steers, 1985). Indikator-indikator ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kemampuan pegawai
Kemampuan masing-masing pegawai dalam pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian melalui SIMAS sangat beragam. Namun dapat disimpulkan bahwa pada user admin BKPSDM, seluruh pegawai telah memahami dan menjalankan tugasnya dengan baik yang dibuktikan dengan adanya tim khusus pengembang SIMAS di BKPSDM Kota Malang.
- 2) Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana yang digunakan dalam penggunaan SIMAS di BKPSDM Kota Malang sudah terpenuhi dan layak digunakan. Hal tersebut dibuktikan dengan tersedianya komputer kantor yang memadai serta website SIMAS yang dikelola dengan baik untuk

mendukung proses pelayanan kepegawaian terkait update data atau pemutakhiran data melalui Sistem Informasi Manajemen ASN (SIMAS).

2. Faktor pendukung dan penghambat penggunaan SIMAS dalam pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian di BKPSDM Kota Malang.

a. Faktor Pendukung

Untuk mencapai tujuan program, faktor pendukung sangat penting. Ini dapat mencakup dukungan dari sumber daya alam, pemerintah, dan sarana dan prasarana pendukung lain. Adapun faktor pendukung dalam Komponen yang mendukung pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian melalui SIMAS ASN di BKPSDM Kota Malang adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Walikota Malang Nomor 113 Tahun 2019 ditetapkan sebagai peraturan yang sah terkait pelaksanaan SIMAS pada lingkup Pemerintah Kota Malang. Sistem ini akan digunakan oleh BKPSDM Kota Malang untuk mencapai tujuan program yaitu menghasilkan data kepegawaian yang akurat.
- 2) Adanya dukungan teknis untuk mendukung integrasi dalam pelaksanaan SIMAS ASN dengan memfasilitasi sistem serta seluruh jaringan informasi dan komunikasi saat melakukannya.
- 3) Adanya tim khusus pengembang SIMAS di BKPSDM Kota Malang yang melakukan sosialisasi serta bimbingan teknis untuk mendukung kompetensi sumber daya aparatur dalam melaksanakan adaptasi terkait penggunaan SIMAS.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian melalui SIMAS serta menghambat tercapainya keberhasilan dari suatu kebijakan program sehingga menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan pemutakhiran data yang menghambat pelayanan kepegawaian adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan penyimpanan arsip setelah proses pemutakhiran data belum sepenuhnya dilakukan secara digital sehingga pencapaian tujuan dalam menerapkan konsep paperless belum maksimal.
- 2) Kurangnya kesadaran pegawai dalam memutakhirkan data pribadinya

dikarenakan proses integrasi dan sosialisasi belum dilaksanakan secara rutin sehingga menyebabkan data yang dihasilkan belum termutakhir sepenuhnya.

- 3) Proses adaptasi yang mengakibatkan tidak meratanya pemahaman pegawai terkait penggunaan SIMAS dalam proses pemutakhiran data.

Kesimpulan

Pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian melalui SIMAS BKPSDM Kota Malang dianalisis berdasarkan indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam (Steers 1985) pada indikator pencapaian tujuan dan integrasi sudah efektif. Hal tersebut ditandai dengan mutakhirnya data ASN sesuai dengan tujuan ketercapaian program serta adanya pelaksanaan sosialisasi yang sudah sesuai dengan rencana kinerja yang disusun oleh BKPSDM Kota Malang sebagai sarana komunikasi antar organisasi Pemerintah Daerah pada lingkup Pemerintah Kota Malang, juga adanya pengembangan sistem yang semula SIMPEG menjadi SIMAS. Namun dalam proses adaptasi dapat dilihat dari kemampuan pegawai serta sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan program, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pegawai dalam penggunaan SIMAS belum efektif. Hal tersebut dikarenakan beragamnya pengguna SIMAS yaitu pengguna personal, pengguna admin OPD, dan pengguna admin BKPSDM yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang berbeda-beda. Pengguna yang beragam dengan rentan usia serta latar belakang yang berbeda, menyebabkan kurang meratanya pemahaman pegawai terkait penggunaan SIMAS dalam pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian.

Saran

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan saran terkait penggunaan SIMAS dalam pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian di BKPSDM Kota Malang, diantaranya yaitu:

1. Diperlukan adanya sosialisasi secara rutin sehingga informasi terkait adanya pemutakhiran data dapat disampaikan secara rinci dengan mengikuti perubahan yang terjadi pada sistem.
2. BKPSDM Kota Malang diharapkan mampu melaksanakan pendampingan serta pelatihan secara berkala kepada ASN yang terkendala dalam pemahaman menggunakan teknologi informasi khususnya SIMAS.
3. Membentuk tim teknis SIMAS di setiap OPD yang sesuai dengan kemampuannya dalam mengelola teknologi informasi serta melakukan bimbingan teknis SIMAS untuk

meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya kepegawaian dalam melaksanakan pelayanan melalui SIMAS.

Daftar Pustaka

Buku

- Karim, A., Bangun, B., Purnama, I., Harahap, S. Z., Irmayani, D., Nasution, M., ... & Munthe, I. R. 2020. *Pengantar teknologi informasi*. Yayasan Labuhanbatu Berbagi Gemilang.
- Mukhlis, S. 2012. *Administrasi Kepegawaian*. Yogyakarta: Penerbit Leutika Nouvalitera.
- Pasolong, H. 2019. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Prasodjo, Tunggul. 2023. *PELAYANAN PUBLIK ERA DIGITAL*.
- Sawir, M. 2020. *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Deepublish.
- Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Steers, Richard M. 2005. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Wijoyo, H. 2021. *Sistem Informasi Manajemen*.

Artikel Jurnal

- Agung, B., & Arifin, M. 2020. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pada Administrasi Dan Pelayanan Kepegawaian Dalam Kerangka Merit System Di Lingkungan.
- Arifah, U. 2020. Transformasi Birokrasi Melalui E-Government. *Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial*, 4(2), 30-41.
- Atmojo, S. K. 2020. Penerapan Sistem Informasi Manajemen (Sim) Dalam Meningkatkan Produktivitas Divisi Perencanaan Diknas Kota Palembang. Undergraduate Thesis thesis, UIN Raden Fatah Palembang.
- Banurea, O. K. 2023. Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital: Pencegahan Pelanggaran Praktek Kampanye Berbasis Digital. *Mediation: Journal Of Law*, 59-77.
- Cahyono, A., Muchsin, S., & Ilyas, T. R. 2023. Efektivitas Penerapan Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Perizinan (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang). *Respon Publik*, 17(11), 29-37.
- Cardea, V. 2021. *Efektivitas Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Dalam Pengurusan Dokumen Kepegawaian Pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru*.
- Djawa, M. K., & Puspasari, D. 2015. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Untuk Mendukung

E-Government Pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Perkantoran (JPAP)*, 3(3), 1-15.

- Gusman, S. A. 2017. *Manajemen/Administrasi Kepegawaian*.
- Hariyanto, S. 2016. Sistem Informasi Manajemen. *Publiciana*, 9(1), 80-85.
- Hefniy, H., & Fairus, R. N. 2019. Manajemen Strategi dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Kepegawaian. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 169-197.
- Hertiwi, H. 2020. *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Untuk Peningkatan Produktivitas Kerja Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Lombok Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Irawan, B., & Hidayat, M. N. 2021. E-government: konsep, esensi dan studi kasus. *Universitas Mulawarman Repository "REPO-MAN."*
- Nani, F. L., Rowa, H., dan Martini, A. 2021. Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 6 (1). pp. 102-111.
- Oktaviana, R., & Yuliani, F. 2022. Efektivitas Pelaksanaan e-Office Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 15(1), 62-71.
- Putri, U. H. 2019. Efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan.
- Rubiati, N., Kurniawan, R., Elisawati, E., & Wahyuni, S. 2020. Sistem Pendukung Keputusan Pengusulan Kenaikan Pangkat Berbasis Web Pada Kantor Camat Sungai Sembilan. *INFORMATIKA*, 12(2), 33-42.
- Sari, N. H. F., Muchsin, S., & Sunariyanto, S. 2019. Efektivitas Pelayanan Kesehatan Pasien Bpjs (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Di Puskesmas (Studi Kasus Di Puskesmas Dinoyo Kota Malang). *Respon Publik*, 13(3), 113-121.
- Syafriyani, I., & Zaituna, Y. P. 2018. Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian: Studi Di BKPSDM Kabupaten Sumenep. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(1), 28-34.
- Tasya, S. C., Fuad, A., & Widyastuti, Y. 2017. Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.
- Wirawan, V. 2020. Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal*

Penegakan Hukum Dan Keadilan, 1(1), 1-16.

Wulandari, U., & Simon, H. J. 2019. Pengaruh Efektivitas Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Medan Perjuangan. *Publik Reform*, 5(1).

Yusrizal. 2014. Efektivitas Program Pemberdayaan Desa (PPD) Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Ditinjau Dari Ekonomi Islam. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 125 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Walikota Malang Nomor 113 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Malang

Peraturan Walikota Malang Nomor 46 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Website

BKPSDM Kota Malang. Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara. <https://simas.malangkota.go.id/>

BKPSDM Kota Malang. 2020. Materi SIMAS. <https://bkpsdm.malangkota.go.id/images/Bimtek/simas2020.ppsx> (diakses pada 9 Desember 2023)

BKPSDM Kota Malang. 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. https://bkpsdm.malangkota.go.id/images/artikel/LKPJ_2022 (diakses pada 9 Desember 2023)